

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

JL. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223, TELP. 0967-581157, FAX. 0967-581014
Homepage: <http://www.pn-jayapura.go.id>; e-mail : pnjayapura@yahoo.co.id
ABEPURA – JAYAPURA 99351

PERNYATAAN PERJANJIAN KINEJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAMIM THOHARI, SH.,M. Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Jayapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : HERU PRAMONO, SH. M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura



HERU PRAMONO, SH. M.Hum
NIP. 196111191985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Jayapura



KHAMIM THOHARI, SH.,M. Hum.
NIP. 196712031992121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan b. Presentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan c. Presentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan d. Presentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan e. Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu f. Presentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu g. Presentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu h. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor i. Presentase Perkaa yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI j. Presentase Perkaa yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI k. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi l. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 70% 70% 70% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu b. Presentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Pesentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi d. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu e. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 	<ul style="list-style-type: none"> 85% 85% 85% 100% 100 %

3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0% 0% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Jumlah Pengawasan Biaya Perkara b. Jumlah Pengawasan Keuangan Dipa c. Jumlah Pengawasan Administrasi Umum	100% 100% 100%
6.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat Administrasi Umum b. Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis.	10 % 50 %

Kegiatan DIPA 01		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 10.426.797.000,-
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
TOTAL		Rp. 10.451.797.000,-

Kegiatan DIPA 03		Anggaran
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 313.610.000,-
TOTAL		Rp. 313.610.000,-

Jayapura, Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura



HERU PRAMONO, SH. M.Hum
NIP. 196111191985121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Jayapura



KHAMIM THOHARI, SH.,M. Hum.
NIP. 196712031992121001